

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan berkembang sangat cepat dalam era globalisasi, terutama dalam penyajian informasi. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan yang menyajikan informasi dibutuhkan berbagai pihak seperti pemerintah, pemegang saham, penanam modal dan kreditur untuk pengambilan keputusan-keputusan yang harus dilakukan dengan cepat berdasarkan informasi yang memadai (Setianingrum, 2016).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Puspaningsih, 2017).

Berdasarkan hasil audit temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak terdapat isu yaitu Otoritas Jasa Keuangan memulai pembangunan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mendukung penguatan tugas wasit di sektor keuangan (*bisnis.tempo.co*, 2015).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 kepada DPR RI. Dalam laporannya tersebut, BPK menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern di LKPP 2016. (*sindonews.com,2016*).

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan menghasilkan temuan yang berbeda atau adanya GAP hasil penelitian. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Prpto (2010), Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. penelitian Vidyasari (2012), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Prasetyo (2015), bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan *good corporate governance* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Komarasari (2016), pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Langenre (2017), kapasitas sumber daya manusia secara parsial tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Serta Ismail (2017) kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatan waktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan di BPKAD kota Palopo.

Alasan pengambilan judul karena untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi dan sistem penegendalian intern

digunakan pada laporan keuangan serta apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Maka berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan hasil penelitian yang telah di uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keandalan Laporan Keuangan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan bidang ekonomi, Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti yang

melakukan penelitian sejenisnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemeriksaan keuangan daerah dapat memberikan sumbangan pikiran atau koreksi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2.2 Bagi masyarakat sebagai *stakeholder* eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bagi peneliti dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat sesuai khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

### 1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mencakup pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini hanya dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Palopo.

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya, sehingga peneliti tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada variabel bebas yaitu Kualitas sumber daya manusia ( $X_1$ ), Pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) dan Pengendalian intern akuntansi ( $X_3$ ). Sementara variabel terikat adalah Keandalan laporan keuangan ( $Y$ ).



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori *stewardship*

*Stewardship theory* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Sehingga teori ini mempunyai dasar sosiologi dan psikologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward akan berusaha mencapai target organisasinya. Teori ini didesain bagi peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan agar dapat termotivasi untuk bertindak dengan metode terbaik pada prinsipalnya (Donaldson dan Davis, 1991). Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen.

Asumsi filosofi mengenai teori *stewardship* juga dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Dimana rakyat sebagai principal dan pemerintah sebagai *stewards*, adalah sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan kejujuran pada pihak lainnya. Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mewujudkan

transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik Mulyani (2018).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal (Lewier, 2016). Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya (Kurniawati, 2016). Pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan terhadap masyarakat.

## **2.2 Sumber Daya Manusia**

### **1. Pengertian Sumber Daya Manusia**

Menurut Winidyaningrum dalam Suparman (2014: 3) menyatakan bahwa kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu memahami logika akuntansi dengan baik, maka kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan tidak akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan laporan tersebut akan sesuai dengan standar yang ditetapkan

pemerintah (Suparman, 2014: 3).

Menurut Hullah (2012: 11) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

2. Indikator Kualitas sumber Daya Manusia adalah:

Menurut Griffin (2004) dalam Delanno (2013), Kualitas Sumber Daya Manusia dapat diukur melalui:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dapat dibagi menjadi: (a) pendidikan formal, (b) pendidikan informal, (c) pendidikan nonformal.

b. Pelatihan

Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

c. Pengalaman

Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan (Delanno, Fajar dan Deviani 2013).

### **2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

1. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, *techne* yang berarti 'keahlian' dan *logia* yang berarti 'pengetahuan'. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada obyek benda yang



digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan yang merupakan aspek strategis untuk pengambilan keputusan.

Teknologi informasi menurut Kadir (2013) didefinisikan sebagai studi penggunaan peralatan elektronika, terutama computer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Secara lebih umum, Mulyadi (2014:21) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan kantor dan telekomunikasi.

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2014), pemanfaatan teknologi informasi pada sebagian besar perusahaan saat ini bukan lagi menjadi barang langka yang sulit ditemukan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa teknologi informasi telah menjadi kebutuhan sekaligus persyaratan bagi organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Teknologi informasi sangat dibutuhkan organisasi untuk membantu 23 mencapai tujuannya, namun pengadaan Teknologi informasi membutuhkan investasi yang besar. Investasi Teknologi informasi yang sudah dikeluarkan perusahaan harus dapat dijalankan dengan maksimal. Teknologi informasi pada organisasi tidak cukup hanya diatur (manage) oleh bagian Teknologi informasi saja, tetapi harus dikelola (govern) secara profesional. Pengelolaan Teknologi informasi yang profesional disebut sebagai tata kelola teknologi informasi (IT Governance).

## 2. Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Suyanto (2005:11) dalam Elvin (2017), Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat diukur melalui penggunaan komponen

berikut:

a. Perangkat Keras Komputer (*Hardware*)

Perangkat keras bagi sesuatu system informasi terdiri atas masukan dan keluran. Sebagai unit meyimpan file dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran.

b. Perangkat Lunak Komputer (*Software*)

Seperti system perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti system pengoprasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis computer untuk memenuhi kebutuhan pengguna, contohnya: e-commerce, DSS (Decision Support System), e-banking, SAP, dan sebagainya.

c. Jaringan dan Komunikasi

Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk mempermudah dan menjaga kualitas hubungan melalui internet. Sejak saat itulah perkembangan alat-alat yang menyokong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat.

### **2.3 Sistem Pengendalian Intern**

#### **1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Sistem Pengendalian Inter (SPI) menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Mahmudi (2010) pengertian system pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut UU No. 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## 2. Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu menurut PP No. 60 Tahun 2008, diantaranya:

### a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau lembaga tentang pengendalian intern yang dapat menimbulkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian bagi instansi atau lembaga yang bersangkutan. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

### b. Penilaian risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindak lanjuti (PP Nomor 60 Tahun 2008).

## **2.5 Keandalan laporan keuangan**

Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi yang memiliki kualitas andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Keandalan merupakan kualitas informasi yang disampaikan laporan keuangan menyebabkan pemakai informasi sangat tergantung pada kebenaran informasi yang dihasilkan. Keandalan suatu informasi sangat tergantung pada kemampuan suatu informasi untuk menggambarkan secara wajar peristiwa yang digambarkan sesuai

dengan kondisi yang sebenarnya Rama Dhonal (2018).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1) dalam Wulan, 2019 menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas/ laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.”

Menurut Kasmir (2013:7), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini saat ini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode.

Laporan keuangan pemerintah daerah, disajikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Mahmudi, 2010:3). dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Mahmudi, 2010:2. Dari sisi eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik (Mahmudi , 2010:2). Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan (Mahmudi, 2010:3).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan Keuangan

adalah: "Laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya"(IAI,2012).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
  - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreks ekspektasi mereka dimasa lalu.
  - b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
  - c) Tepat waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
  - d) Lengkap  
Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.
2. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara

jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

a) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara intern dan eksternal. Perbandingan secara intern dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## 2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

### Tabel 2.1



### Review Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil dari Penelitian
1.	Febriady Leonard Sembiring  (2007) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Padang	Metode kuantitatif	Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Keterandalan Laporan Keuangan.	Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada instansi pemerintah daerah
2.	Susilo Prapto  (2010). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.	Metode kuantitatif	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3.	Wiwik Andriani, SE., M.Si. A k. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan	Metode kuantitatif	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Keterandalan	Penelitian ini membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keugan pemerintah

	Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.		Dan Ketepatanwaktuan Laporan	daerah.hal ini berarti bahwa nilai informasi akan andal jika memiliki sumber data manusia mendukung.
4.	Tiara Vidyasari (2012). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode kuantitatif	Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5.	Annisa Rachmawati (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode kuantitatif	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh secara statistic tidak signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah akan tetapi penengendalian intern akuntansi berpengaruh secara statistic signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan

				daerah.
6.	Wayan Edi Suparman, Nyoman Trisna Herawati, S.E., M.Pd .Ak, Dr. Edy Sujana, S.E., M.Si.ak (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.	Metode kuantitatif	Kualitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi dan keterandalan laporan keuangan.	Hasil penelitian kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah kabupaten Buleleng, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah kabupaten Buleleng
7.	Kadek Hengki Primayana, Ananta Wikrama Tungga Atmadja, SE, Ak., M., Nyoman Ari Surya Darmawan, S.E., Ak. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah	Metode kuantitatif	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Hasil dari penelitian ini adalah memadainya kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian intern akuntansi yang baik berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

	Daerah.			
8.	Aditya Rachman Prasetyo  (2015). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.	Metode kuantitatif	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,  Sistem Pengendalian Intern Dan Keterandalan Laporan Keuangan	Hasil pengujian hipotesis adalah kapsitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan <i>Good Corporate Governance</i> mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh.
9.	Desy Setianingrum  (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode kuantitatif	Kapasitas sumber daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,  Sistem Pengendalian Intern dan keterandalan laporan keuangan.	Kapasitas sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara statistic signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara statistic signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan
10.	Risdayanti Nur Sholikah, Dewi Saprtantinah Puji	Metode kuantitatif	Pengawasan Internal, Pemahaman	Hasil penelitian diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang

	<p>Astuti, Muhammad Rofiq Sunarko (2016). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan DPPKAD Kabupaten Boyolali.</p>		<p>Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>signifikan variabel bebas yaitu pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah dipemerintah daerah Kabupaten Boyolali.</p>
11.	<p>Karmila, Amries Rusli Tanjung dan Edfan Darlis (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.</p>	<p>Metode kuantitatif</p>	<p>Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Kapasitas sumber daya manusia dan pengendalian intern tidak terdapat keterandalan pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Riau.</p>
12.	<p>Waris Komarasari (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian</p>	<p>Metode kuantitatif</p>	<p>Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi</p>	<p>Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variable pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan</p>

	Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul		dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	terhadap keterandalan keuangan pemerintah daerah.
13.	Ismail (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman)	Metode kuantitatif	Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
14.	Natalya Narasuiang (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian	Metode kuantitatif	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

	Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.		Keuangan Pemerintah Daerah.	
15.	Fitri Susanti (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode kuantitatif	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.
16.	Sahroni S. Langenre (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode kuantitatif	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Kapasitas sumber daya manusia secara parsial tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boul
17.	Shinta Permatasari, dan Banu Witono (2017)	Metode kuantitatif	Kapasitas Sumber Daya Manusia,	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variable

	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah.		Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah.	kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
18.	Mayang Wulandari (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi	Metode kuantitatif	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia yang dimoderasi oleh komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan.
19.	Rai Dwi Andayani W.A.A.G.P Widanaputr dan Ida Bagus Putra Astika.(2018). Lingkungan Kerja dan <i>Locus of</i>	Metode kuantitatif	Lingkungan kerja, <i>Internal locus of control</i> ,Peggunaan Teknologi Informasi dan Keandalan	Hasil penelitian analisis menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan <i>internal locus of control</i> memperkuat pengaruh pengguna teknologi informasi pada



	<i>control</i> Sebagai Pemoderasi Pengaruh Pengguna Teknologi Informasi Pada Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.		Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.	keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
20.	Muhammad Azis Anshori(2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	Metode kuantitatif	Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Ketepatan Pelaporan Keuangan Pemerintah	Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber daya manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak mempunyai pengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan daerah.

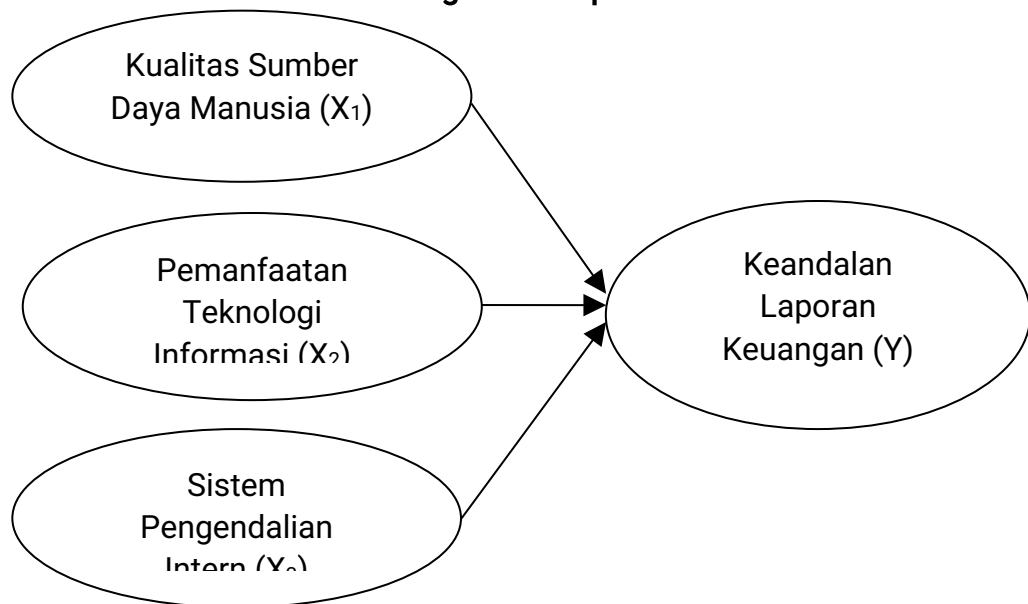
## 2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengidentifikasi tiga variabel yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ), Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_2$ ), Sistem Pengendalian Intern ( $X_3$ ), Keandalan Laporan Keuangan ( $Y$ ).

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

### Kerangka Konseptual



### 2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian” (Sugiyono, 2013:98). Hipotesis disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi ada atau tidaknya Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Laporan Keuangan dalam hipotesis berikut:

H<sub>1</sub>: Diduga bahwa Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

H<sub>2</sub>: Diduga bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

H<sub>3</sub>: Diduga bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka – angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan didalam memecahkan suatu masalah.

#### **3.2 Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) yang berada di Kota Palopo dengan waktu penelitian kurang lebih 2 (dua) bulan.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2017) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor BPKAD Kota Palopo yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Kepala BPKAD, Sekretariat, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Aset Daerah dan Bidang Akuntansi sebanyak 112 orang.

##### **2. Sampel**

Menurut Sugiyono (2016) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan sampel ini harus dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pegawai yang

berada di kantor BPKAD Kota Palopo yakni sebanyak 112 orang, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 40 responden. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kriteria pemilihan sampel**

No.	Kriteria
1	Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai/staf yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan dan para pegawai atau staf pemegang kas baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran pada BPKAD di Kota Palopo.
2	Responden dalam penelitian ini adalah sub bagian keuangan dan kepala BPKAD Kota Palopo selaku pengambil keputusan dalam menggunakan anggaran.

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan dari 40 sampel diantaranya kepala BPKAD 1 orang, Bidang Akuntansi dan Pelaporan berjumlah 17 orang, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan berjumlah 22 orang.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Kemudian data yang berupa angka dianalisis dengan metode statistik. Penelitian ini bertujuan menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statik, untuk menunjukkan hubungan antara variabel dan ada pula yang bersifat mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal (Sugiyono, 2012).

Sugiyono (2012) menjelaskan bahwa sumber primer adalah sebagai berikut: "Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung menyediakan data untuk pengumpulan data." Pengumpulan data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara langsung dengan semua pihak yang terlibat dalam penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer, yaitu berupa jawaban dari responden terhadap pernyataan yang terdapat dikuesioner yang dibagikan dan dikumpulkan dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kota Palopo. Adapun sumber data dari artikel, jurnal, skripsi, dan tesis yang diterbitkan dan dipublikasikan serta melalui buku yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui:

#### **3.5.1 Observasi**

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2013).

#### **1.5.2 Kuesioner (*questionnaire*)**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden auditor. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dijawab dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2012). Jika peneliti mengetahui dengan pasti variabel mana yang akan diukur dan apa yang dapat diperoleh dari narasumber, maka kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efektif. Selain itu, jika jumlah responden

cukup banyak dan tersebar di wilayah yang luas maka kuesioner juga sesuai pertanyaan / pernyataan tertutup atau terbuka dapat diberikan kepada orang yang diwawancarai secara langsung, atau dikirim melalui surat atau Internet.

### **3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

#### **3.6.1 Variabel penelitian**

Menurut Sugiyono (2013), variabel penelitian adalah adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (*Independen Variabel*), adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*Independen variabel*) adalah Kualitas sumber daya manusia ( $X_1$ ), Pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) dan Pengendalian intern akuntansi ( $X_3$ ). Sementara variabel terikat adalah Keandalan laporan keuangan ( $Y$ ).
2. Variabel Terikat (*Dependen Variabel*), adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat (*dependent variabel*) adalah Sementara variabel terikat adalah Keandalan laporan keuangan ( $Y$ ).

#### **3.6.2 Definisi operasional variabel**

Berikut ini adalah definisi operasional variabel dari penelitian ini:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia ( $X_1$ )

Menurut Griffin (2004) dalam Delanno (2013), Kapasitas Sumber Daya Manusia dapat diukur melalui:

- a. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan

dapat dibagi menjadi: (a) pendidikan formal, (b) pendidikan informal, (c) pendidikan nonformal.

b. Pelatihan

Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

c. Pengalaman

Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan (Delanno, Fajar dan Deviani 2013).

d. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas. Tanggung jawab yang baik adalah dapat memahami dan melaksanakan tugas sesuai deskripsi jabatan.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_2$ )

Teknologi Informasi suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Menurut Suyanto (2005:11), Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat diukur melalui penggunaan komponen berikut:

a. Perangkat Keras Komputer (*Hardware*)

Perangkat keras bagi sesuatu system informasi terdiri atas masukan dan keluran. Sebagai unit meyimpan file dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran.

b. Perangkat Lunak Komputer (*Software*)

Seperti system perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung



pendistribusian data dan informasi seperti system pengoprasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis computer untuk memenuhi kebutuhan pengguna, contohnya: *e-commerce*, *DSS (Decision Support System)*, *e-banking*, *SAP*, dan sebagainya.

c. Jaringan dan Komunikasi

Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk memepermudah dan menjaga kualitas kualitas hubungan melalui internet. Sejak saat itulah perkembangan alatalat yang menyokong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat. Berdasarkan uraian diatas, indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil modifikasi peneliti, diantaranya: (1) Penggunaan komputer (*Hardware dan Software*), dan (2) penggunaan jaringan.

3. Sistem Pengendalin Intern ( $X_3$ )

Sistem Pengendalin Intern merupakan metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu menurut PP No. 60 Tahun 2008, diantaranya:

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau lembaga tentang pengendalian intern yang dapat menimbulkan kesadaran

seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian bagi instansi atau lembaga yang bersangkutan. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko merupakan identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti (PP Nomor 60 Tahun 2008).

4. Keandalan Laporan Keuangan (Y)

Laporan keuangan merupakan dokumen yang melaporkan tentang kondisi perusahaan dalam istilah moneter dan menyediakan informasi untuk membantu dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Adapun indikator variabel ini adalah:

a. Relevan, laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang

termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreks ekspektasi mereka dimasa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

b. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

1) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

### 3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

#### c. Dapat dibandingkan

Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara intern dan eksternal. Perbandingan secara intern dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

#### d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## 3.7 Teknik Analisis Data

### 3.7.1 Analisis regresi linear berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda adalah mencari pengaruh antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Dua atau lebih variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu, regresi berganda merupakan metode yang akan meneliti ada atau tidaknya hubungan antara satu kejadian dengan jumlah kejadian yang lain. Persamaan regresi linear yang terdiri dari dua variabel bebas.

Rumus Regresi Linear Berganda adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Dimana:

Y = Keandalan Laporan Keuangan

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta$  = Koefesien regresi

$X_1$  = Kualitas Sumber Daya Manusia

$X_2$  = Pemanfaatan Teknologi Informasi

$X_3$  = Sistem Pengendalian Intern

$e$  = Eror

### 3.7.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau gambaran data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Dalam statistik deskriptif, hasil jawaban responden akan dideskripsikan menurut masing-masing variabel penelitian, tetapi digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (sugiyono,2012).

### 3.7.3 Uji Kualitas Data

Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, maka instrumen harus diuji terlebih dahulu. Tujuan pengujian intrumen ini adalah untuk mengetahui validitas dan reabilitas instrumennya sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya instrumen yang akan digunakan dalam pengambilan data penelitian.

#### 1. Uji Validitas

Validitas adalah alat ukur digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner (Ghozali, 2013). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut. Uji validitas digunakan metode *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Apabila korelasi antar skor masing masing butir pertanyaan dengan total skor tiap konstruknya signifikan pada level 0,01 dan 0,05, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2013).

## 2. Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2013). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *one shot* yaitu pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Dalam hal ini SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik dengan *cronbach alpha* ( $\alpha$ ). Menurut Ghozali (2013), suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan *cronbach alpha*  $>0,70$ .

### 3.7.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah model yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika hasil kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data terdistribusi tidak normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (bebas) yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation

Faktor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai tolerance di atas 0,10 atau nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghazali,2016).

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas berupa grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat dengan nilai residualnya. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada polayang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,2016).

#### 3.7.5 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis adalah cabang Ilmu Statistika Inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut.

##### 1. Koefisien determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinan merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel perubahan pada variabel bebas (suliyanto 2011). Untuk menghitung koefisien determinasi diperlukan nilai kuadrat selisi nilai Y riil dengan nilai Y rata-rata.

##### 2. Uji t (parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah regresi variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

### 3. Uji F ( Uji Simultan)

Uji digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) secara bersama-sama ( simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Derajat kepercayaan yang digunakan adalah ..... atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikan berarti hubungan terjadi dapat berlaku untuk populasi ( dapat digeneralisasikan).



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kantor BPKAD Kota Palopo**

##### **4.1.1 Sejarah singkat BPKAD Kota Palopo**

Pada awal dibentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Setelah adanya Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

##### **4.1.2 Visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)**

###### **a. Visi**

" Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga, Dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya, Dan Lingkungan Yang Terkemuka Di Indonesia".

###### **b. Misi**

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumberdays manusia (SDM) aparat pelaksana pengelola keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo terdapat susunan organisasi yang terdiri dari:

a. Kepala Badan

Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Ase Daerah mempunyai Tugas Pokok, Melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
3. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional dibidang pengelolaan keuangan daerah;
4. Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. Sekretaris

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Tugas pokok, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan dan seluruh datuan organisasi dalam lingkup Badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi, Tindak lanjut dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai Fungsi:

1. Pelaksanaan urusan Sekretariat, rumah tangga dan aset badan;
2. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut.
3. Pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat.
4. Penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran dan.
5. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan.

c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Kepala bidang anggaran dan perbendaharaan mempunyai Tugas pokok, menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan

dan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD, mengordinasikan dan memverifikasi RKA, DPA dan DPPA, menyiapkan data untuk penerbitan SPD, anggaran kas, serta menyiapkan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan pinjaman atas nama Pemerintah Kota. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai Fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan APBD.
2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
3. Pengoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah.

4. Pengeordinasian penyusunan standar biaya masukan dan pedoman lainnya terkait pelaksanaan anggaran.
5. Pengeordinasian dan pelaksanaan perbendaharaan daerah.

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai Tugas Pokok, memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas badan dalam lingkup pelaksanaan kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi, penyusunan laporan dan penyajian informasi keuangan daerah, dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan sistem Akuntansi pemerintah kota.
2. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah pemerintah kota.
3. Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah kota dan pelaporan kinerja keuangan pemerintah kota.
4. Pembinaan dalam rangka pelaporan BLUD.
5. Pelaksanaan pengeordinasian dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

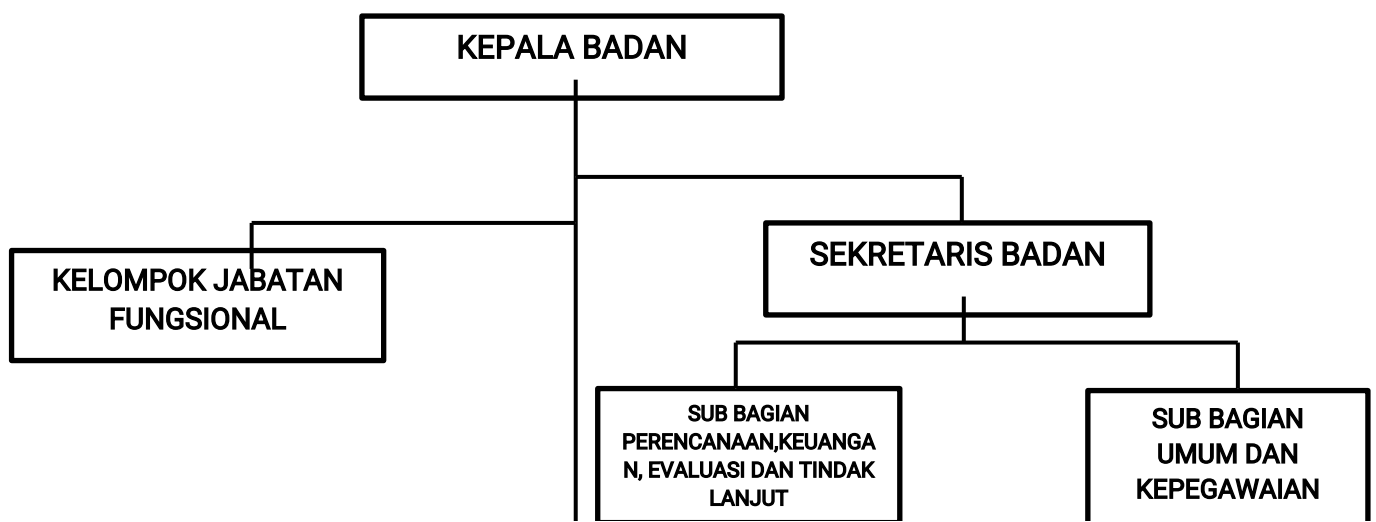
e. Bidang Aset Daerah

Bidang aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala bidang aset daerah mempunyai Tugas pokok, memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan sebagian tugas badan dalam lingkup perencanaan dan analisa, penatausahaan dan pengamanan serta pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala bidang aset daerah mempunyai Fungsi:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang.
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pedoman pengelolaan barang milik daerah.
3. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan aset daerah.
4. Pelaksanaan administarasi pengelolaan barang milik daerah.
5. Pelaksanaan manajemen pengelolaan barang milik daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi BPKAD Kota Palopo dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.1** Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo



SUB BIDANG PENYUSUNAN  
APBD

SUB BIDANG PENGELOLAAN  
KAS DAN INVESTASI DAERAH

SUB BIDANG  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD

UPTD

#### 4.2 Deskriptif Statistik

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagai mana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum Sugiono (2012). Analisis statistik deskriptif ini meliputi tabel, grafik, rata-rata (*mean*), standar deviasi nilai maksimum,

nilai minimum, dan jumlah penelitian sehingga penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. hasil analisis statistik deskriptif yang diolah dengan menggunakan SPSS.

### 4.3 Uji Validitas dan Uji Realibilitas

#### 4.3.1 Uji validitas data

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *produc moment personcorrelation*. Data dinyatakan valid jika nilai  $r_{hitung}$  yang merupakan nilai item dari *correctedItem-Total Correlation* > dari  $r_{table}$  pada signifikansi 0,05 (5%). Berikut ini disajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut

**Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	X1.1	0,786	0,304	Valid
	X1.2	0,786	0,304	Valid
	X1.3	0,815	0,304	Valid
	X1.4	0,857	0,304	Valid
	X1.5	0,837	0,304	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	X2.1	0,476	0,304	Valid
	X2.2	0,497	0,304	Valid
	X2.3	0,499	0,304	Valid
	X2.4	0,603	0,304	Valid
	X2.5	0,810	0,304	Valid
	X2.6	0,561	0,304	Valid
Sistem	X3.1	0,799	0,304	Valid

Pengendalian Intern (X3)	X3.2	0,639	0,304	Valid
	X3.3	0,797	0,304	Valid
	X3.4	0,674	0,304	Valid
	X3.5	0,797	0,304	Valid
	X3.6	0,824	0,304	Valid
	X3.7	0,736	0,304	Valid
	X3.8	0,729	0,304	Valid
Keandalan Laporan Keuangan (Y)	Y1	0,545	0,304	Valid
	Y2	0,576	0,304	Valid
	Y3	0,600	0,304	Valid
	Y4	0,723	0,304	Valid
	Y5	0,685	0,304	Valid
	Y6	0,528	0,304	Valid

Sumber : Data diolah diSPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Karena nilai *Corrected Item-Correlation* > r tabel pada signifikan 0,05 (5%).

#### 4.3.2 Uji realibilitas data

Reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator variabel. Jika jawaban responden tetap stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dianggap dapat diandalkan. Untuk mengukur nilai reliabilitas digunakan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Jika *Conbach Alpha* yang dibangun > 0,60, maka dinyatakan reliabel.



**Tabel 4.2 Hasil Uji Realibilitas**

Variabel	Alpha Cronbach's	Batas Reliabilitas	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,809	0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,732	0,60	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,780	0,60	Reliabel
Keandalan Laporan Keuangan (Y)	0,732	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2020

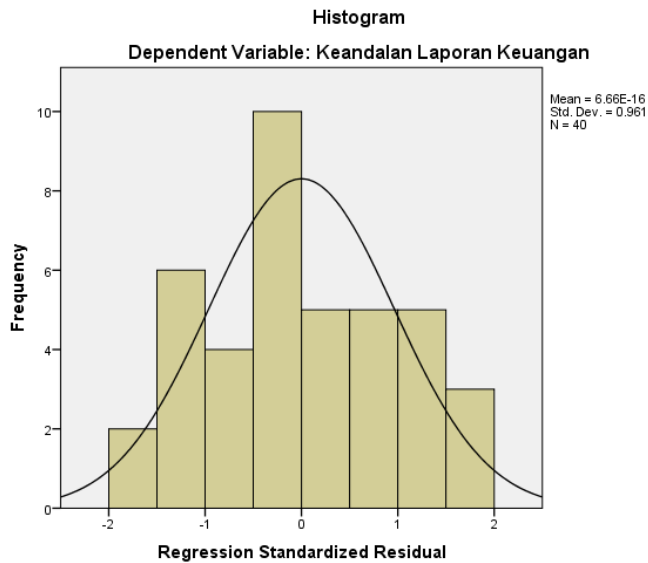
Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, karena nilai *Cronbach Alpha* dari variabel total lebih besar dari 0,60, sehingga cocok digunakan sebagai alat ukur alat angket dalam penelitian ini.

#### **4.4 Uji Asumsi Klasik**

##### **4.4.1 Uji normalitas**

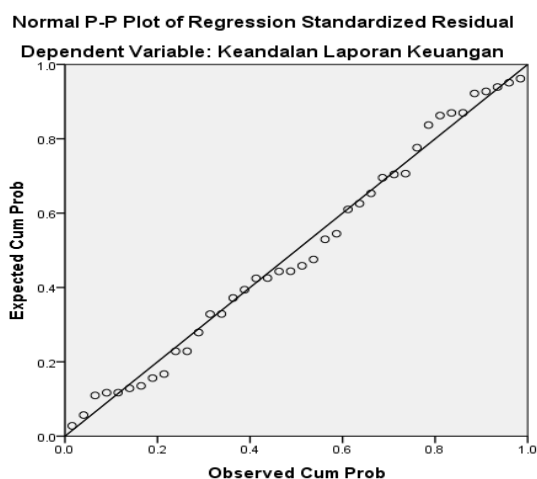
Uji normalitas Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data yang dianalisis. Uji normalitas ini untuk menguji apakah variabel pengganggu atau variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual harus normal karena jika nilai residual tersebut tidak normal, maka uji statistik akan menjadi tidak valid. Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, penelitian ini menggunakan dua tahap dalam penentuan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov*. Berikut uji normalitas data dengan menggunakan analisis grafik.

#### **Gambar 4.2 Grafik Histogram Uji Normalitas**



Grafik di atas menunjukkan bahwa distribusi penyebaran residual yang normal, karena grafik tersebut tidak menunjukkan arah yang condong ke kanan maupun ke kiri. Meskipun dalam grafik tersebut terdapat beberapa residual yang melenceng dari garis, akan tetapi jumlah tersebut dimaklumi karena hanya sedikit. Selain dari grafik di atas, uji normalitas data ini juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal plot dibawah ini:

**Gambar 4.3 Grafik Plot Uji Normali**



Dalam grafik normal plot di atas dapat diketahui bahwa data residual dalam penelitian ini normal. Hal tersebut terjadi karena apabila residual

berasal dari distribusi yang normal, maka nilai sebaran terletak disekitar garis lurus. Pada gambar grafik di atas juga terlihat bahwa sebaran residual yang dilambangkandengan titik atau lingkaran kecil tersebar disekeliling garis diagonal dan mengikuti arahnya sehingga, normalitas dalam penelitian ini terpenuhi.

#### 4.4.2 Uji multikolonieritas

Uji *multikolonieritas* ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independenya. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil dari uji *multikolonieritas* dalam penelitian ini:

**Tabel 4.3 Uji Multikolonieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.046	4.034		.259	.797		
Kualitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi Informasi Sistem Pengendalian Intern	.419	.116	.428	3.608	.001	.981	1.019
	.516	.125	.494	4.129	.000	.965	1.036
	.101	.059	.203	1.709	.096	.981	1.020

a. Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Sumber : Data yang diolah di SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji *multikolonieritas* yang dapat dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang dapat diperoleh dari masing-masing variabel adalah > 0,100. Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut adalah, variabel Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 0,981, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,965 dan

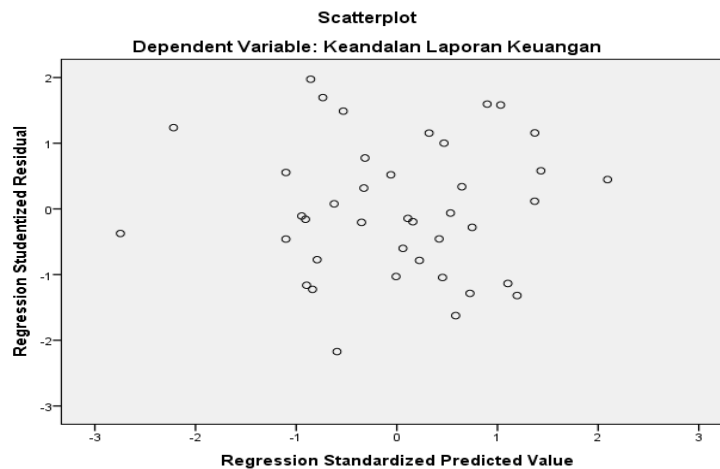
Sistem Pengendalian Intern sebesar 0,981. Sehingga nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen syarat, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel  $> 0,100$ .

Sedangkan untuk standar akuntansi pemerintah nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini adalah Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar 1.019, Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 1.036 dan Sistem Pengendalian Intern sebesar 1.020. Oleh karena itu, nilai ini juga memenuhi persyaratan lain dari uji poliklonal ini, yaitu VIF harus kurang dari 10.000. Karena itu, kita bisa mengambil kesimpulannya adalah tidak terdapat gejala miltikolinearitas antar variabel dalam penelitian ini.

#### **4.4.3 Uji heteroskedastisitas**

Uji *heteroskedastisitas* adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji apakah di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya tetap, maka disebut sebagai *homoskedastisitas*. Akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut *heteroskedastisitas*. Penelitian yang baik adalah penelitian yang menggunakan model regresi yang baik, yaitu dengan menggunakan model regresi yang *homoskedastisitas* atau tidak *heteroskedastisitas*. Berikut hasil pelaksanaan uji *heteroskedastisitas*

#### **Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data yang diolah di SPSS, 2020

Gambar di atas merupakan gambar yang diperoleh dari hasil uji *heteroskedastisitas* dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Dari hasil grafik di atas terlihat titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Oleh karena itu, dengan hasil yang demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi dalam penelitian ini. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi keandalan laporan keuangan menggunakan variabel independennya adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern.

#### 4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pada kantor BPKAD Kota Palopo. Hasil yang diperoleh dari proses perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.046	4.034		.259	.797
Kualitas Sumber Daya Manusia	.419	.116	.428	3.608	.001
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.516	.125	.494	4.129	.000
Sistem Pengendalian Intern	.101	.059	.203	1.709	.096

a. Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Sumber: Data yang diolah di SPSS, 2020

Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas  $X_1$  (Kualitas Sumber Daya Manusia) sebesar 0,419, Pemanfaatan Teknologi  $X_2$  sebesar 0,516 dan koefisien variabel bebas sebesar  $X_3$  0,101. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah:  $Y = 1,046 + 0,419 x_1 + 0,516 x_2 + 0,101 x_3 + e$

Dimana:

- Y : Keandalan Laporan Keuangan
- $x_1$  : Kualitas Sumber Daya Manusia
- $x_2$  : Pemanfaatan Teknologi Informas
- $x_3$  : Sistem Pengendalian Intern
- e : Error

Persamaan regresi linear di atas dapat diketahui bahwa:

- a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas sebesar 1,046 artinya apabila variabel kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pngedalian intern bernilai nol maka keandalan laporan keuangan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo tetap sebesar 1,046.
- b. Nilai koefisien ( $\beta_1$ ) sebesar 0,419 menunjukkan bahwa pengaruh kualitas sumber daya manusia ( $X_1$ ) terhadap keandalan laporan keuangan(Y) adalah positif atau searah, artinya jika ditingkatkan variabel

kualitas sumber daya manusia sebesar satu satuan, maka keandalan laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,419.

- c. Nilai koefisien ( $\beta_2$ ) sebesar 0,516 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ( $X_2$ ) terhadap keandalan laporan keuangan ( $Y$ ) adalah positif atau searah, maka jika ditingkatkan variabel, pemanfaatan teknologi informasi sebesar satu satuan, maka keandalan laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,516. Nilai koefisien ( $\beta_3$ ) sebesar 0,101 menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern ( $X_3$ ) terhadap keandalan laporan keuangan ( $Y$ ) adalah positif atau searah, maka jika ditingkatkan variabel, sistem pengendalian intern sebesar satu satuan, maka keandalan laporan keuangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,101.

#### 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

##### 4.6.1 Uji koefisien determinasi adjusted (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi  $R^2$  dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5** Koefisien Determinasi Adjusted  $R^2$

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.709 <sup>a</sup>	.503	.461	2.038	2.312

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Sumber: Data yang diolah di SPSS, 2020

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas yang ditunjukkan oleh Adj.  $R^2$  dari persamaan regresi menghasilkan nilai sebesar 0,416. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yang terdiri dari kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap variabel

dependen keandalan laporan keuangan adalah sebesar 41,6% sedangkan sisanya sebesar 58,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

#### 4.6.2 Hasil uji parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka dibandingkan antara nilai thitung dengan ttabel serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* ( $\alpha$ ). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 persen (0,05). Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Bila  $H_0$  ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:40).

**Tabel 4.7** Hasil Uji Parsial (Uji t)

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.046	4.034		.259	.797
Kualitas Sumber Daya Manusia	.419	.116	.428	3.608	.001
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.516	.125	.494	4.129	.000
Sistem Pengendalian Intern	.101	.059	.203	1.709	.096

a. Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

Sumber: Data yang diolah di SPSS, 2020

Berdasarkan data dari Tabel 4.7 diketahui nilai t tabel pada taraf sig. 5 % dengan persamaan sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = n - k : \alpha / 2$$

$$= 40 - 4 - 1 : 0,05 / 2$$



= 35 : 0,025

= 1,400

Keterangan: n: jumlah sampel

k: jumlah variabel

l: konstan

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji statistik t untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

### 1. Hasil Pengujian Hipotesis H1

#### **H1 : Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Keandalan Laporan Keuangan**

Untuk melihat pengaruh Kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan laporan keuangan digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta melihat nilaisignifikannya. Dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $sig.t < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima dan sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $sig.t > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Dari Tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 3,608 > 1,400 dan  $sig.t (0,001) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

### 2. Hasil Pengujian Hipotesis H2

#### **H2: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan**

Untuk melihat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keandalan Laporan Keuangan digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara

variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta melihat nilai signifikannya. Dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $sig.t < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima dan sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $sig.t > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak.

Dari Tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 4,129 > 1,400 dan  $sig.t (0,000) < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan.

### 3. Hasil Pengujian Hipotesis H3

#### H2: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan

Untuk melihat pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta melihat nilai signifikannya. Dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan  $sig.t < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima dan sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $sig.t > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak  $sig.t < \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima dan sebaliknya jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan  $sig.t > \alpha = 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak.

Dari Tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 1,709 > 1,400 dan  $sig.t (0,096) > 0,05$  dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap Keandalan Laporan Keuangan, ditolak.

#### 4.6.3 Hasil uji simultan (Uji f)

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan

dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil dari uji statistik F ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.8** Hasil Pengujian Simultan (Uji f)

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	151.180	3	50.393	12.127	.000 <sup>b</sup>
	Residual	149.595	36	4.155		
	Total	300.775	39			

a. Dependent Variable: Keandalan Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada tabel 4.13 di atas dapat dilihat nilai F sebesar 12,127 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai yang jauh lebih dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keandalan laporan keuangan. Dengan kata lain bahwa, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern bersama- sama berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan laporan keuangan**

Hipotesis pertama penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan laporan keuangan. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi ( $\beta_1$ ) sebesar 0,419 dan memiliki nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan

publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal (Lewier, 2016). Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban kinerjanya, masyarakat dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana pemerintah daerah tersebut mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan (Kurniawati, 2016). Pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan terhadap masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2015) berpendapat bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan *good corporate governance* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, Suparman, dkk (2014) kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah dan Permatasari (2017) kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Ismail (2017) kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan dan Anshori (2018) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.

#### **4.3.2 Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan laporan keuangan**

Hipotesis kedua penelitian ini adalah untuk menguji apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan

laporan keuangan. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pada kantor BPKAD Palopo. Hal ini terlihat dari uji hipotesis, koefisien regresi ( $\beta_2$ ) sebesar 0,516, dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Keandalan informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vidyasari (2012) yang meyakini bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Susanti (2017) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah dan Komarasari (2016) pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Prapto (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Nasution(2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan audit keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan

pemerintah daerah.

### **4.3.3 Pengaruh sistem pengendalian interne terhadap keandalan laporan keuangan**

Hipotesis kedua penelitian ini adalah untuk menguji apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pada kantor BPKAD Palopo, ditolak. Hal ini terlihat dari uji hipotesis, koefisien regresi ( $\beta_2$ ) sebesar 0,101, dan nilai signifikansi 0,096 > 0,05. Berdasarkan PP No. 60/2008 Pasal 1 (1) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja) sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keandalan karena laporan keuangan yang dihasilkan benar dan valid.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Komarasari (2016) pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Setianingrum(2016) Pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara statistik signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan dan Primayana, dkk (2014) pengendalian intern

akuntansi yang baik berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Putra (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian

intern tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas keuangan pemerintah dan karmila (2014) menyatakan bahwa pengendalian intern tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis, maka pengujian dan pembahasan hipotesis yaitu Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pada kantor BPKAD Kota Palopo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keandalan Laporan Keuangan pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis pertama diterima.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keandalan Laporan Keuangan pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis kedua diterima.
3. System Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keandalan Laporan Keuangan pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis ketiga diterima.

#### **5.3 Saran**

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan sampel yang lebih banyak.
2. Pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya sebatas penyebaran kuesioner saja tetapi dapat juga dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian.
3. Kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuesioner sangat ditekankan untuk memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan tujuan dan apa yang



diharapkan dalam penelitian.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andriani, W. (2010). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5(1).
- Andrianto, E. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderas (Studi pada SKPD di Kab. Sleman).
- Anshori, M. A. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketetapanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12).
- Arfianti, D. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. (*Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro*), 5(1), 68-90.
- Ariesta, F. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat). 22 (1), 53-72.
- Dahri, A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Palopo: STISIP Veteran Palopo.
- Delanno, Galuh, F. dan Deviani. (2013). "Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai linformasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Wahana Riset Akuntansi (WRA)*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16:49-64.
- Dhonal, R., Rahayu, S., & Yudi. (2018). *Pengaruh Pengendalian Intern*

*Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi pada Aparat Pemerintah di Seluruh Dinas Kabupaten Bun. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 3 (1).*

- Hullah, Abdurahman Rigel. (2012). "Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill, 3(2).*
- Idward, N. N., Majid, J., & Mediyati. (2018). The Effect Of Competence Of Human Resources, Information Technology And Accountability On The Quality Of Regional Financial Statements With Internal Control Systems As A Moderation (Study In District Of Gowa). *International Journal Of Economics Management And Social Science, 1 (4).*
- Institut Akuntan Publik Indonesia, I. (2011). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Penerbit IAPI.
- Ismail. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman).
- Jogiyanto. (2014). *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Kadir, A. (2013). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Karmila, Tanjung, A. R., & Darlis, E. (2013). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Sorot, 9(1).*
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komarasari, W. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan keuangan).
- Kurniawati, M. H. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi*.

Langenre, S. S. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *e Jurnal Katalogis*, 5(8).

Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM-YJPN.

Muda, I., Wardani, D. Y., Erlina, Maksum, A., Lubis, A. F., Bukit, R., et al. (2017). The Influence Of Human Resources Competency And The Use Of Information Technology On The Quality Of Local Government Financial Report With Regional Accounting System As An Intervening. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 95(20).

Mulyadi. (2014). Sistem Akuntansi. Cetakan Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyani, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, *Value For Money*, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS STIKUBANK).

Prapto, S. (2010). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Sragen).

Prasetyo, A. R. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Interen Akuntansi dan Good Corporate Governance Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja di Polda Jambi).

Primayana, K. H., Atmadja, A. T., & Darmawan, N. A. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Buleleng). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).

- Primayani, P. R., Herawati, N. T., & Darmawan, N. A. (2014). Pengaruh Pengendalian Internal, Value For Money, Penyajian Laporan Keuangan Dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Ankutabilita Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Putra, B. D., & Amar, S. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Penerapan standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah kota Padang.
- Puspaningsih, V. D. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Skpd (Studi Empiris pada SKPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul).
- Rachmawati, A. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas PPKAD Kabupaten Boyolali).
- Sedarmayanti, (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sembiring, F. L. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang).
- Setianingrum, D. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar).
- Sholikah, R. N., Astuti, D. S., & Sunarko, D. S. (2016). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informas*, 12, 168-175.

- Suparman, W. E., Herawati, N. T., & Sujana, D. E. (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Susanti, F. (2017). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul) .
- Suyanto. (2005). Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis. Yogyakarta: Andi
- Vidyasari, T. (2012). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali).
- W, R. D., Widanaputra, A., & Astika, I. B. (2018). Lingkungan Kerja dan Locus of Control Sebagai Pemoderasi Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Pada Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(6).
- Wulan, I. R. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan (Studi Empiris pada BPKAD dan Inspektorat Pemerintahan Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi* .
- Wulandari, M. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Solok Selatan).